

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bidang akuntansi sektor publik yang memperoleh sorotan dari banyak pihak sejak adanya reformasi 1998 yakni akuntansi pemerintahan daerah di Indonesia. Demikian dikarenakan terdapat kebijakan baru dari pemerintahan yang melakukan reformasi pada banyak bidang, salah satunya pengelolaan keuangan daerah. Dilakukannya reformasi yakni mengubah dari UU No 25 Tahun 1999 ke UU No. 33 tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dengan Pemda.

Undang-undang tersebut di atas membuat pelaksanaan pedoman otonomi daerah lebih jelas dan rinci terutama dalam hal pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Menurut UU Pasal 1 ayat 5 Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa hak kekuasaan serta kewajiban daerah otonom guna melakukan pengelolaan urusan pemerintah daerah serta kepentingan sosial daerah berdasarkan ketentuan undang-undang disebut otonomi daerah. Tujuan dari kekuasaan ini yaitu guna melakukan pendekatan layanan pemerintah untuk masyarakat, mempermudah dalam pemantauan serta pengontrolan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APD) sebagai insentif untuk inovasi. Pemda dituntut juga untuk mengelola keuangan daerah secara tepat, transparan, dan bertanggung jawab guna mencapai tujuan utama pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih.

Menurut Mardiasmo (2002:11) aspek penting yang harus diwaspadai oleh pemerintah daerah ialah permasalahan pengelolaan keuangan serta anggaran daerah .

Keuangan daerah yang dikelola dengan baik akan mempengaruhi kemajuan daerahnya. Bastian (2001: 6) mengemukakan yakni untuk memberikan gambaran potensi keuangan daerah serta menganalisis kinerja pengelolaan potensi keuangan daerah itu sendiri diperlukan laporan keuangan yang andal serta bisa dipercayakan. Dalam hal ini, analisis kinerja adalah kinerja keuangan Pemda yang bersangkutan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mendasarkan pada kemampuan serta sikap mandiri guna mendapatkan, melakukan pemeliharaan serta memakai potensi perekonomian daerah yang terbatas guna mencukupi kebutuhan masyarakat daerah yang lebih luas. UU No 17 tahun 2003 memberikan peraturan yakni dalam menyusun APBD menggunakan metode prestasi kerja. Supaya memperkuat kebijakan itu, maka diperlukan pendekatan kinerja.

Kinerja yang diukur dipakai guna melakukan penilaian akutabilitas organisasi dan pengelola dalam layanan public yang lebih banyak, yang tidak hanya menunjukkan bahwa dana public telah digunakan, tetapi juga dana public telah digunakan secara efektif (Mardiasmo, 2002: 121). Pembangunan daerah termasuk bagian dari pembangunan nasional yang dijalankan sesuai dengan prinsip otonomi daerah serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), menyediakan peluang bagi pengoptimalan demokrasi serta kinerja daerah untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Semanjuntak, (2001) menemukan yakni kini semua kabupaten dan kota di Indonesia memang telah melaksanakan otonomi daerah, namun belum memenuhi harapan. Pada saat yang sama, kenyataan menunjukkan bahwa pemda belum seluruhnya terlepas dari pemerintah pusat dalam mengelola rumah tangga daerahnya. Demikian tercermin pada konteks koneksi

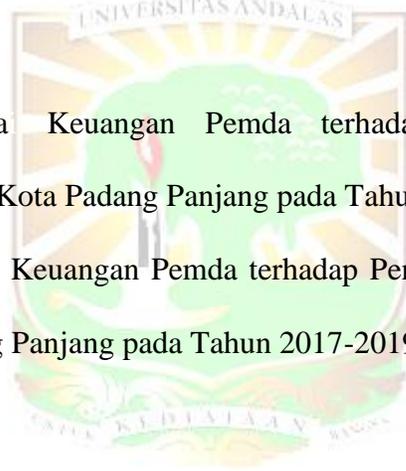
politik serta kerangka kewenangan daerah, serta keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah.

Dari latar belakang tersebut saya tertarik untuk mengangkat masalah kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagai tugas akhir dari kegiatan magang yang saya laksanakan di BPKD Kota Padang Panjang dari tanggal 11 Januari- 05 Maret 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan penulis teliti antara lain:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemda terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang pada Tahun 2017-2019 ?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemda terhadap Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kota Padang Panjang pada Tahun 2017-2019 ?



1.3 Tujuan Magang

Ada beberapa tujuan magang yang ingin penulis capai dalam kegiatan antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemda dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang pada Tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemda dalam Pengelolan Anggaran Belanja Daerah Kota Padang Panjang pada Tahun 2017-2019.

1.4 Manfaat Magang

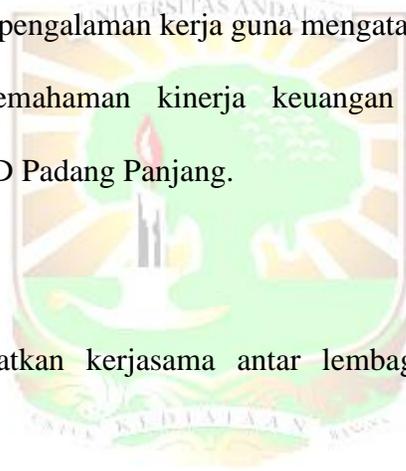
Manfaat kegiatan magang adalah sebagai berikut :

Untuk penulis:

1. Sebagai sarana melatih serta mengaplikasikan teori yang diperoleh dalam perkuliahan ke dalam kerja praktik.
2. Bertambahnya pengetahuan serta wawasan mengenai pekerjaan di tempat kerja.
3. Meningkatnya kreativitas serta keterampilan.
4. Mengumpulkan pengalaman kerja guna mengatasi dunia kerja masa depan.
5. Memberikan pemahaman kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola APBD Padang Panjang.

Instansi Pemerintah:

1. Dapat meningkatkan kerjasama antar lembaga pendidikan dan instansi pemerintah.
2. Dapat membantu peserta magang dalam menjalankan aktivitas kerjanya dengan lancar di BPKD Padang Panjang.
3. Sebagai bentuk partisipasi di BPKD Kota Padang Panjang, membantu mahasiswa untuk memberikan pengetahuan tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola APBD Kota Padang Panjang.



Universitas Andalas:

1. Menjalin kerjasama antar Universitas Andalas dengan BPKD Kota Padang Panjang.
2. Menyediakan lulusan dengan dunia nyata dari penguji pekerjaan.
3. Mendorong kemajuan alumni kedepannya.
4. Mempromosikan potensi sumber daya universitas.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini meliputi latar belakang penulis pada penentuan judul, rumusan permasalahan, tujuan magang, kebermanfaatan magang, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI :

Bab ini mencakup definisi dan tujuan akuntansi pemerintah, pengertian dan pengelolaan keuangan daerah, pengertian dan struktur APBD, pengertian dan manfaat LRA, serta pengertian dan tujuan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH :

Bab ini mencakup gambaran umum dari BPKD di dalamnya terdapat sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi dan tugas pokok, fungsi, serta uraian tugas.

BAB IV ANALISA DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini dipaparkan analisis kinerja keuangan pemda dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah serta penganalisisan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran belanja daerah Kota Padang Panjang tahun 2017-2019.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penarikan simpulan terhadap pertanyaan-pertanyaan merupakan bagian terakhir dari keseluruhan pembahasan, bab ini juga memberikan saran-saran yang relevan berdasarkan observasi.

